

Gerakan Sosial Aliansi Wija To Luwu Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Luwu Raya

Nizar Amalia Amanhy Damayanti¹, Muhammad Syukur²

¹²³Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar
nicaakim13@gmail.com¹, m.syukur@unm.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Tahapan Gerakan sosial aliansi Wija To Luwu dalam upaya pemekaran provinsi Luwu raya dan 2) Faktor penghambat dalam upaya pemekaran provinsi Luwu raya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari masing-masing narasumber yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) Tokoh masyarakat, 2) Mahasiswa, 3) Masyarakat yang ikut serta dalam gerakan Aliansi Wija To Luwu ini. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tahapan gerakan sosial Aliansi Wija To Luwu dalam upaya pemekaran provinsi Luwu raya, yaitu a) Tahap kemunculan (emergence), b) Tahap peleburan (cholescene), c) Tahap Birokratisasi (bureaucratization), d) Tahap Penurunan (decline). 2) Faktor penghambat dalam upaya pemekaran provinsi Luwu raya, yaitu a) Kurangnya Political will dari pemerintah, b) Adanya moratorium pemekaran daerah dari pemerintah.

Kata Kunci: Gerakan sosial, Aliansi Wija To Luwu, Pemekaran daerah.

ABSTRACT

this study aims to determine 1) the stages of the social movement of the Wija To Luwu alliance in efforts to expand greater Luwu province and 2) Inhibiting factors in efforts to expand greater Luwu province. This type of research is qualitative research and descriptive approach. The number of informants in this study was 7 people consisting of each resource person determined through purposive sampling techniques with criteria, namely: 1) Community leaders, 2) Students, 3) People who participated in the Wija To Luwu Alliance movement. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data validity checks are performed by triangulation techniques of data sources. Data analysis is data condensation, data presentation, and conclusion drawing and data verification. The results showed that: 1) The stages of the Wija To Luwu Alliance social movement in an effort to expand the greater Luwu province, namely a) Emergence stage, b) Cholescene stage, c) Bureaucratization stage, d) Decline stage. 2) Inhibiting factors in efforts to expand greater Luwu province, namely a) Lack of political will from the government, b) There is a moratorium on regional expansion from the government.

Keywords: Social movement, Wija To Luwu Alliance, Regional expansion

PENDAHULUAN

Gerakan sosial adalah sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan kesadaran masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan tuntutan atau aspirasi atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Gerakan sosial atau social movement merujuk kepada hubungan defensif individu-individu untuk melindungi ruang public dan private mereka dengan melawan sistem negara atau pasar. Gerakan sosial juga dapat diartikan sebagai

Gerakan kelompok yang terorganisir dan terstruktur dengan upaya untuk mencapai tujuan social (Khobir & Khasanah, 2020; Pababari, 2023; Putra dkk., 2022).

Di Indonesia Gerakan sosial telah banyak terjadi dan jauh sebelum era saat initalah banyak Gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Gerakan sosial di Indonesia mayoritas dan dominan dilakukan oleh Mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai agen perubahan dan penyambung lidah masyarakat. Berbagai Gerakan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh beberapa isu diantaranya, isu politik, isu sosial budaya, isu pendidikan, bahkan sampai kepada isu agama. Dengan adanya perubahan sosial yang begitu cepat serta bergerak secara stimulan, hal ini berdampak pada munculnya beragam kelompok yang memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda (Haris dkk., 2019).

Perubahan sosial yang berlangsung begitu cepat akan berdampak pada beragamnya kebutuhan serta kepentingan individu dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut yang seakan membuat ketimpangan terjadi ditengah masyarakat saat ini. Kondisi seperti itu semakin terasa dalam beberapa dekade terakhir ini terutama sejak terjadinya berbagai konflik serta pertikaian baik pada tingkat kelompok dan organisasi maupun konflik yang terjadi antar negara yang ternyata hal tersebut berdampak besar bagi lahirnya beragam Gerakan sosial dan perilaku kolektif lainnya.

Salah satu gerakan sosial yang paling besar pernah terjadi pada tahun 1998 di akhir era orde baru. Saat itu masyarakat bersama dengan mahasiswa menuntut adanya reformasi pada sistem pemerintahan Indonesia, hal itu diawali dengan adanya krisis moneter yang menyebabkan inflasi di negara Indonesia. Buntut dari adanya Gerakan tersebut ialah mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat selama 32 tahun, kemudian digantikan oleh wakilnya sendiri yaitu BJ. Habibie yang kemudian dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga.

Berakhirnya rezim orde baru menandai lahirnya era pemerintahan saat ini yang dikenal dengan era reformasi terdapat 8 provinsi baru yang dibentuk setelah reformasi 1998 diantaranya, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Pemekaran dari 8 provinsi tersebut memiliki alasan berbeda masing-masing. Perbedaan alasan ini diyakini akan memberikan motivasi suatu pola tertentu mengenai pemekaran daerah di Indonesia. Tentu saja alasan pemekaran provinsi akan berbeda dengan hal pemekaran kabupaten/kota di suatu wilayah Indonesia, karena setiap pemekaran provinsi yang terjadi memiliki alasan pembentukan khas masing-masing. Sejak beberapa dekade terakhir, pemekaran daerah menjadi wacana dominan yang menjadi perdebatan masyarakat. Sebagian besar berpendapat bahwa pemekaran daerah sebagai indikasi menguatnya praktik desentralisasi. Pendapat itu kemudian diyakini bahwa pemekaran daerah membawa wajah baru bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Pemekaran daerah diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik, sehingga menciptakan pemerintah lokal yang baik serta membangun demokrasi substantif di tingkat lokal. Tujuan utama dari dimekarkannya daerah adalah membagi daerah konsentrasibesar menjadi daerah konsentrasi yang lebih kecil agar lebih

mudah untuk dimanajementi. Dalam pendekatan potensi, suatu daerah yang berpotensi untuk dimekarkan minimal harus memenuhi persyaratan ekonomi, kapasitas pemerintah, dan tolak ukur politik (Syamsu dkk., 2020). Secara ekonomi, daerah harus memiliki sumber-sumber ekonomi pendukung, ditunjang oleh jumlah penduduk yang cukup serta lokasi daerah pemekaran harus memenuhi beberapa sarana dan prasarana publik, seperti sekolah hingga perguruan tinggi.

Kemunculan Gerakan sosial sering kali diawali oleh rasa ketidakpuasan, bentuk dari ketidakpuasan bisa terhadap norma-norma yang sedang berlaku, ketidakadilan struktur sosial, kondisi politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, diskriminasi kelompok terhadap identitas tertentu dan keseluruhannya bisa pula dilihat dari kacamata ideologi dan perspektif yang berbeda-beda. Gerakan social Aliansi Wija To Luwu muncul karena adanya kesadaran kolektif masyarakat Tana Luwu yang menginginkan adanya perubahan. Meskipun hingga saat ini Gerakan Aliansi Wija To Luwu tergolong kurang massif tapi itu tidak mematahkan semangat masyarakat Tana Luwu untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Dengan dibentuknya Gerakan Aliansi Wija To Luwu ini masyarakat, para tokoh-tokoh, mahasiswa dan sebagainya diharapkan mampu menjadikan gerakan ini sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun keresahan mereka. Karena pada dasarnya dengan cara inilah maka suara mereka baru akan didengar oleh atasan ataupun pemerintah dan juga dengan cara beginilah maka isu ini akan diharapkan mampu menjadi isu yang nasional. Sebagaimana fungsi ataupun tujuan dari aksi ataupun demo itu adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan masyarakat.

Wacana pemekaran wilayah terus menjadi wacana yang saat ini dibahas dan akan direalisasikan, salah satu wilayah yang menjadi wacana pemekaran provinsi ialah Provinsi Luwu Raya di daerah Luwu Raya Sulawesi Selatan. Pada dasarnya, pemekaran daerah merupakan tindakan yang baik jika dalam konsep awal otonomi daerah yang ditetapkan bertujuan dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Namun realitas yang terjadi kebanyakan pemekaran yang telah dilakukan malah berbanding terbalik, pemekaran daerah hanya akan menguntungkan beberapa golongan dan kelompok tertentu. Pemekaran daerah masih sering dijadikan sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum oleh para elit dan politisi. Janji pemekaran sering dijadikan sebagai alat politik yang bersifat kepentingan sementara tanpa mengikuti kriteria pemekaran yang benar. Isu pemekaran di Tana Luwu menjadi salah satu contoh implikasi dari proses demokratisasi era reformasi. Tuntutan pemekaran ini muncul dari aspirasi masyarakat Luwu yang menuntut janji pemekaran dari wilayah kabupaten menjadi provinsi. Tana Luwu yang digelar Bumi Sawerigading, adalah daerah bekas Kerajaan Luwu yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Tana Luwu dibagi menjadi 3 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Luwu dengan ibu kota Belopa, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota Masamba, dan Kabupaten Luwu Timur dengan ibu kota Malili (Rasyid dkk., n.d.).

Tana Luwu atau Luwu Raya memiliki komoditi unggulan yaitu pada sektor perkebunan, pertanian, pertambangan dan jasa. Sektor perkebunan komoditi unggulannya, yaitu kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, kemiri, lada, pala, sagu, dan vanili. Untuk sektor pertanian, komoditi yang diunggulkan berupa jagung, tembakau, dan ubi kayu. Sementara untuk sektor pertambangan Tana Luwu memiliki salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur yang dikelola oleh PT. Vale Indonesia Tbk Sorowako. Sedangkan sektor jasa, yaitu unggulannya pada sektor pariwisata alam dan budayanya. Komoditi di berbagai sektor tersebut menjadi andalan dan keunggulan dari Tana Luwu yang dapat menjadi potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan potensi alam dan pertumbuhan perekonomian seperti itu, pemerintah setempat berani untuk mengajukan permohonan agar Kawasan tersebut menjadi daerah otonom baru (DOB).

Namun hingga saat ini keinginan masyarakat Tana Luwu yaitu adanya pembentukan provinsi Luwu Raya hanya sekedar wacana. Padahal jika dilihat dari sudut pandang sejarah, Kedatuan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Pernyataan ini kemudian melandasi Presiden Soekarno menjanjikan pembentukan Provinsi Tana Luwu ke Datu Luwu, Andi Djemma. Wacana pemekaran ini telah memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Bahkan wacana pemekaran ini mengalami pasang surut dan hanya kembali menjadi isu hangat dalam kontestasi politik di cakupan wilayah Luwu Raya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Murdiyanto (2020, h. 19) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif yakni penelitian yang memberikan penjelasan tentang fakta berdasarkan objek/sasaran fenomenologis yang berusaha mengungkapkan makna dibalik fakta”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang diambil bukan angka tetapi melalui proses wawancara secara mendalam dan rinci agar dapat memperoleh data dan hasil yang akurat. Peneliti juga melakukan observasi dan juga studi dokumentasi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo. Fokus penelitian ini adalah Gerakan social aliansi wija to luwu terhadap upaya pembentukan provinsi Luwu Raya dengan mencari informasi mengenai tahapan Gerakan social aliansi wija to luwu terhadap wacana pembentukan provinsi luwu raya, pembentukan daerah otonomi baru serta factor penghambat dalam upaya pembentukan provinsi luwu raya. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sebagaimana menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Yani, n.d.). Kemudian dengan cara observasi, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung dan sistematis terhadap keadaan yang terjadi di Tana Luwu. Selanjutnya dengan mengambil dokumentasi dengan

memperoleh dokumen biasanya cenderung menjadi data sekunder. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan Teknik triangulasi sumber data, Triangulasi sumber data adalah membandingkan cara mengecek ulang tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Contohnya dengan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Teknik analisis data Menurut Miles, Di dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan (Miles, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Gerakan Sosial Aliansi Wija To Luwu Dalam Upaya Pembentukan Provinsi Luwu Raya

Sejak beberapa dekade terakhir, pemekaran daerah menjadi wacana dominan yang mewarnai perdebatan masyarakat. Sebagian besar berpendapat bahwa pemekaran daerah ‘membawa wajah baru’ bagi pelaksanaan pemerintahan/otonomi daerah. Desentralisasi memperkuat aspek lokalitas, mendorong ruang partisipasi, mengedepankan transparansi, sebuah rangkaian kebijakan yang membuat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih akuntabel. Sebaliknya, desentralisasi dan otonomi daerah justru membuat praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi lebih rumit, yaitu dengan menciptakan kekuatan politik lokal yang baru, membuat relasi daerah menjadi lebih kompleks dan pada konteks tertentu melahirkan sejumlah praktik tata kelola pemerintahan yang kurang efisien.

Tuntutan ini berawal dari permintaan pemberian hak istimewa yang berkembang menjadi isu pemekaran daerah. Namun, tuntutan pemekaran daerah oleh para elit lokal berusaha ditenggelamkan oleh pemerintahan Orde Baru. Kenyataan ini didukung oleh pemerhati adat di Luwu. Isu pemekaran muncul sebagai kesadaran akan sejarah Luwu yang merupakan kerajaan besar. Fakta sejarah inilah yang menguatkan para tokoh elemen adat mendukung realisasi pemekaran daerah. Isu pemekaran di Tana Luwu menjadi salah satu contoh implikasi dari proses demokratisasi era reformasi. Tuntutan pemekaran ini muncul dari aspirasi masyarakat Luwu yang menuntut janji pemekaran dari wilayah kabupaten menjadi provinsi. Tana Luwu yang digelar Bumi Sawerigading, adalah daerah bekas Kerajaan Luwu yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya isu yang beredar bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (PEMPROV) tidak ingin melepaskan wilayah Luwu Raya menjadi sebuah wilayah yang berdiri sendiri dengan status sebagai provinsi baru di Kawasan pulau Sulawesi ini. Beredar isu pada tataran Aliansi Wija To Luwu bahwa proses pemekaran yang tertunda bertahun-tahun adalah bentuk ketakutan Pemprov dalam melepaskan Luwu Raya yang disangkutpautkan dengan APBD provinsi yang sebagian besar dari wilayah Luwu Raya. Hal demikian yang membangun kesadaran Aliansi tersebut untuk menyuarkan aspirasinya kepada pemerintah provinsi. Terhitung sejak tahun ini bahwa aliansi Wija To Luwu telah melakukan menyuarkan aspirasinya di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebanyak 7 kali,

dengan membawa aspirasi merealisasikan wacana pembentukan provinsi Luwu Raya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Gerakan Aliansi Wija To Luwu ini merupakan salah satu bentuk Gerakan yang dilakukan oleh para masyarakat Luwu Raya yang resah akan wacana yang sedari dulu dijanjikan oleh pemerintah tapi hingga saat ini belum direalisasikan kejelasannya. Maka dari itu dengan adanya wacana pemekaran wilayah Luwu Raya ini yang belum terealisasikan oleh pemerintah, oleh sebab itu gerakan Aliansi Wija To Luwu menjadi tombak ukur sekaligus menjadi panggung bagi masyarakat dalam menyampaikan semua aspirasinya, menyampaikan keresahannya, dan juga menyampaikan bagaimana isu atau wacana pemekaran wilayah Luwu Raya ini cepat terealisasikan.

Gerakan sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan (Achmad, 2020). Kemunculan Gerakan sosial sering kali diawali oleh rasa ketidakpuasan, bentuk dari ketidakpuasan bisa terhadap norma-norma yang sedang berlaku, ketidakadilan struktur sosial, kondisi politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, diskriminasi kelompok terhadap identitas tertentu dan keseluruhannya bisa pula dilihat dari kacamata ideologi dan perspektif yang berbeda-beda.

Alasan lain sebab dibentuknya gerakan aliansi Wija To Luwu ini adalah bagaimana masyarakat, para tokoh-tokoh, mahasiswa dan sebagainya mampu menjadikan gerakan ini sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun keresahan mereka. Karena pada dasarnya dengan cara inilah maka suara mereka baru akan didengar oleh atasan ataupun pemerintah dan juga dengan cara beginilah maka isu ini akan diharapkan mampu menjadi isu yang nasional. Sebagaimana fungsi ataupun tujuan dari aksi ataupun demo itu adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bertentangan dengan napa yang dimaksud dengan masyarakat.

Setelah munculnya gerakan Aliansi Wija To Luwu ini Tahapan pertama dalam proses terjadinya gerakan sosial masyarakat Luwu adalah tahap kemunculan (emergence). Awal dari munculnya gerakan ini adalah dimana pada saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Andi Djemma membentuk 7 Soekarno muda yang dimana maksud dari 7 soekarno muda ini adalah sebagai bentuk keseriusan Kerajaan Luwu dalam memperjuangkan NKRI, dan juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan Kerajaan Luwu pada saat itu. Karena terang-terangan mendukung pemerintah RI, Tana Luwu pada saat itu kembali dikontrol oleh NICA dan membuat kekacauan di beberapa wilayah Tana Luwu yang mengakibatkan emosi rakyat Luwu kembali tersulut. Rakyat Luwu kemudian mengatur strategi untuk melakukan penyerangan tetapi berita tersebut lebih dulu sampai ke telinga NICA yang kemudian mengatur siasat untuk terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap rakyat Luwu dan berencana menangkap Datu Luwu Andi Djemma. Perang yang tadinya akan dilakukan pada 5 Januari 1946 dimajukan menjadi 13 Januari 1946. Karena peristiwa 13 Januari inilah yang membuat Soekarno takjub terhadap Kerajaan Luwu karena mempertahankan kedaulatan NKRI, sehingga menjanjikan

Tana Luwu nantinya menjadi sebuah Daerah Istimewa. Gerakan pertama kali dimulai pada tahun 80an yang dibentuk oleh Wija To Luwu yang terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Pada saat itu Aliansi Wija To Luwu mulai melakukan aksinya dengan cara demonstrasi serta melakukan konsolidasi dengan pemerintah. Tetapi realitanya ini tersebut sampaisekarang tidak direalisasikan, hingga saat ini wacana tersebut masih di suarakan dengan cara masyarakat membuat gerakan Aliansi Wija To Luwu yang dijadikan masyarakat sebagai jembatan untuk menyampaikan protes ataupun aspirasi kepada pemerintah.

Kemudian setelah tahap munculnya selanjutnya adalah Tahap peleburan (cholescene) yang ditandai dengan adanya penyatuan arah gerakan dan mobilisasi massa yang lebih luas menuju gerakan sosial yang terkonsolidasi. Pada tahap ini Wija To Luwu yang terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh pemuda dan tokoh adat mulai menyatukan pendapat dan tujuan, melakukan konsolidasi sdengan membentuk sebuah Aliansi yang diberi nama Aliansi Wija To Luwu yang dimana Wija To Luwu berarti Bija atau orang Luwu dan juga mengajak masyarakat umum untuk kemudian bergabung untuk memperjuangkan provinsi luwu raya. Kemudian membahas tentang strategi dan taktik untuk memulai aksi sehingga aksi bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Aliansi Wija To Luwu juga membentuk Komite pembentukan Provinsi Luwu Raya yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai aliansi yang diharap dapat membantu proses pembentukan provinsi luwu raya ini.

Gerakan sosial atau gerakan Aliansi Wija To Luwu pada tahapan ini juga telah berhasil mengatasi beberapa kendala-kendala yang sebelumnya menjadi hambatan dalam proses penyatuan gerakan Aliansi Wija To Luwu ini. kendala-kendala yang dimaksud seperti masih banyak Masyarakat yang kurang tau atau kurang respect mengenai pergerakan ini, kemudian masih banyak Masyarakat yang terkubu-kubu karena adanya perbedaan pendapat, kecurigaan adanya persekongkolan serta menganggap bahwa Gerakan ini hanyalah permainan elit politik dan faktor gerakan yang kurang kondusif serta lama sehingga kurang dapat mengontrol secara terpusat setiap aktifitas warga terkait upaya gerakan Aliansi Wija To Luwu ini.

Tahapan selanjutnya dalam proses pelaksanaan gerakan sosial ini adalah tahap birokratisasi (bureaucratization) yang ditandai dengan pembentukan aliansi Wija To Luwu bersatu sebagai identitas dan wadah gerakan sosial. Setelah membangun basis gerakan sosial dan jaringan komunikasi yang semakin solid dan melakukan pendidikan massa untuk membangun akses pengetahuan sertapemahaman advokasi, serta melakukan aksi demonstrasi, konsolidasi dan membangun komitmen maka semakin banyak elemen masyarakat yang simpati dan ingin terlibat dalam gerakan aliansi Wija To Luwu.

Dan yang terakhir adalah tahap yang menentukan berhasil tidaknya gerakan Aliansi Wija To Luwu ini yakni tahap penurunan (decline) dalam tahap ini Aliansi Wija To Luwu belum mendapat transparansi terkait pembentukan Provinsi Luwu Raya karena adanya penundaan atau moratorium dari pemerintah pusat yang dimana izin untuk membentuk atau memekarkan provinsi baru belum di cabut oleh pemerintah pusatsehingga gerakan ini

terbilang masih belum maksimal dalam menyuarakan persoalan wacana pemekaran provinsi Luwu Raya ini. Selain itu gerakan sosial masyarakat luwu dalam hal ini gerakan Aliansi Wija To Luwu mengalami kegagalan untuk mencapai tujuannya karena hingga saat ini penundaan masih berlanjut yang mengakibatkan hambatan dan membatasi pergerakan aliansi. Selama rentan waktu tersebut intensitas gerakan Aliansi Wija To Luwu hingga saat malah menjadi minim.

Alasan lain sebab dibentuknya gerakan aliansi Wija To Luwu ini adalah bagaimana masyarakat, para tokoh-tokoh, mahasiswa dan sebagainya mampu menjadikan gerakan ini sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun keresahan mereka. Karena pada dasarnya dengan cara inilah maka suara mereka baru akan didengar oleh atasan ataupun pemerintah dan juga dengan cara beginilah maka isu ini akan diharapkan mampu menjadi isu yang nasional. Sebagaimana fungsi ataupun tujuan dari aksi ataupun demo itu adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bertentangan dengan napa yang dimaksud dengan masyarakat.

Gerakan aliansi Wija To Luwu menjadi sarana bagi masyarakat dan aktor-aktor lainnya untuk menyampaikan aspirasi mereka secara bersama-sama, dengan harapan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran nasional tentang isu pemekaran wilayah Luwu Raya. Melalui aksi massa, gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat dan berbagai elemen di Luwu Raya bersatu dan solidaritas dalam mendukung isu pemekaran wilayah ini. Kesatuan dan solidaritas ini dapat memperkuat posisi gerakan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Aksi-aksi massa dan gerakan sosial seperti ini juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pemekaran ini ada banyak sekali jalan atau bentuk yang dilalui oleh para aliansi seperti aksi, demo dan juga mobilisasi sumber daya aksi ataupun demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau, kelompok atau mahasiswa di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Selain aksi demonstrasi, mobilisasi sumber daya juga perlu ataupun mampu menjadi salah jalur bagi aliansi dalam menyampaikan aspirasinya dikarenakan mobilisasi sumberdaya adalah upaya yang memastikan tercukupinya sumber daya gerakan ataupun aliansi dalam pengembangan, pelaksanaan dan keberlanjutan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari gerakan itu tersendiri. Dengan begitu sudah jelas dengan adanya jalur aksi, demonstrasi, dan juga mobilisasi massa ini maka lebih mempermudah aliansi khususnya dalam gerakan Aliansi Wija To Luwu ini dalam menyampaikan keresahannya yaitu mengenai wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya ini.

Gerakan aliansi Wija To Luwu menjadi sarana bagi masyarakat dan aktor-aktor lainnya untuk menyampaikan aspirasi mereka secara bersama-sama, dengan harapan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran nasional tentang isu pemekaran wilayah Luwu Raya. Melalui aksi massa, gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat dan berbagai elemen di Luwu Raya bersatu dan solidaritas dalam mendukung

isu pemekaran wilayah ini. Kesatuan dan solidaritas ini dapat memperkuat posisi gerakan dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Aksi- aksi massa dan gerakan sosial seperti ini juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan pemekaran ini ada banyak sekali jalan atau bentuk yang dilalui oleh para aliansi seperti aksi, demo dan juga mobilisasi sumber daya aksi ataupun demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang atau, kelompok atau mahasiswa di hadapan umum dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Selain aksi demonstrasi, mobilisasi sumber daya juga perlu ataupun mampu menjadi salah jalur bagi aliansi dalam menyampaikan aspirasinya dikarenakan mobilisasi sumberdaya adalah upaya yang memastikan tercukupinya sumberdaya gerakan ataupun aliansi dalam pengembangan, pelaksanaan dan keberlanjutan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari gerakan itu tersendiri. Dengan begitu sudah jelas dengan adanya jalur aksi, demonstrasi, dan juga mobilisasi massa ini maka lebih mempermudah aliansi khususnya dalam gerakan Aliansi Wija To Luwu ini dalam menyampaikan keresahannya yaitu mengenai wacana pemekaran Provinsi Luwu Raya ini.

Gerakan Aliansi Wija To Luwu benar-benar muncul karena adanya kesepakatan antara presiden Soekarno dengan Kerajaan Luwu tepatnya pada kepemimpinan Andi Jemma bahwasannya nantinya daerah Luwu akan menjadi suatu daerah yang dijadikan sebagai provinsi di Indonesia bagian timur. Tetapi hingga saat ini janji tersebut tidak di realisasikan oleh pemerintah maka dari itu, masyarakat membentuk sebuah gerakan yang Namanya gerakan Aliansi Wija To Luwu. Gerakan ini ada karena wacana pemekaran wilayah ini dan juga gerakan ini di jadikan masyarakat sebagai jembatan ataupun landasan untuk melakukan protes, menagih janji, dan juga sekaligus landasan dalam menyampaikan suara atau aspirasi masyarakat Luwu. Gerakan sosial didorong suatu persepsi bahwa segalanya tidak baik. Suatu gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk menuju ranah publik (RAHMATULLOH, 2020; TRIYONO, 2020). Gerakan juga dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi yang lainnya untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan. Kelompok masyarakat yang merasa tidak adil atau terpinggirkan dari kebijakan pemerintah atau masyarakat umum dapat bersatu untuk mencari perubahan. Terkadang gerakan sosial baru dapat muncul karena terinspirasi oleh gerakan sosial

Sementara itu, terkait dengan teori gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori nilai tambah (value added theory) oleh Neil J. Smelser. Teori ini berfokus pada analisis tindakan kolektif dan perubahan sosial sebagai akibat dari nilai tambah atau akumulasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Smelser, 2019). Keyakinan bersama, nilai-nilai, atau ideologi yang menjadi landasan gerakan sosial dan memberikan tujuan bersama yang dikejar oleh kelompok menjadi faktor penting munculnya tindakan kolektif. Ketika ketegangan (tension) eksis, maka perilaku kolektif juga akan muncul (Rochadi, 2020; Smelser, 2019). Dalam konteks Aliansi Wija To Luwu, gerakan sosial dapat muncul karena ada keyakinan bersama bahwa pemekaran wilayah adalah solusi terbaik untuk

mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Nilai-nilai, identitas budaya, dan aspirasi bersama menjadi landasan yang menggerakkan masyarakat untuk bergerak bersama dalam gerakan sosial ini.

Faktor Penghambat Dalam Upaya Pembentukan Provinsi Luwu Raya

Rencana pemekaran Luwu raya saat ini masih tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat tetapi pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengajukan permintaan ke pemerintah pusat agar pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dapat diberi diskresi. Diajukannya Luwu sebagai kabupaten baru di Sulawesi Selatan merupakan wujud dari aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang selama ini meminta agar daerah itu bisa otonom. Rencana pemekaran Luwu saat ini masih tertunda karena adanya alasan dari pemerintah pusat tetapi pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengajukan permintaan ke pemerintah pusat agar pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dapat diberi diskresi. Diajukannya Luwu sebagai kabupaten baru di Sulawesi Selatan merupakan wujud dari aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang selama ini meminta agar daerah itu bisa otonom. Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa salah satu hambatan upaya pemekaran provinsi Luwu Raya, yaitu kurangnya perhatian aparat pemerintah, padahal sebelum keluarnya moratorium oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah diundang oleh DPR RI untuk mengikuti rapat tentang verifikasi persyaratan Administrasi DOB (gambar hal 91) tetapi karena kurangnya perhatian pemerintah sehingga tidak seorangpun perwakilan pemerintah setempat menghadiri rapat tersebut. Oleh karena itu minimnya komunikasi pemerintah setempat kepada pemerintah pusat yang membuat pemerintah pusat seakan lupa akan wacana atau isu ini, olehnya itu pemerintah sekaligus Sebagian besar masyarakat harus turut ikutserta menyuarakan atau membantu tuntutan mengenai wacana pemekaran luwu rayaini. Kemudian juga karena adanya perbedaan kepentingan pada berbagai pihak dan keinginan politik yang tidak seragam dari pemerintah daerah sehingga menghambat proses otonomi daerah.

Dengan adanya gerakan ini diharapkan akan mempermudah pemerintah dan juga masyarakat dalam menyuarakan atau meyampaikan aspirasinya semua tentang wacana pemekaran luwu raya ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Khairullah & Cahyadin (2006) bahwa “Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat”. Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon wilayah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya alam yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang.

Alasan lain pemekaran luwu raya ini tidak terlaksana hingga sekarang adalah dikarenakan adanya moratorium atau penundaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat

mengenai sistem pemekaran disuatu wilayah. Moratorium sesuatu kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai sikap atau dapat diartikan sebagai penundaan atau penangguhan. Sedangkan dalam dunia pemerintahan moratorium ini selalu digunakan dalam menanggulangi kebijakan-lebijakan tertentu misalnya dalam sistem pemekaran suatu wilayah atau pembuatan suatu provinsi yang baru, maka moratorium atau sistem penundaan ini akan diterapkan apabila dalam proses pemekarannya terdapat masalah atau kendala yang mengakibatkan pemekaran wilayah tersebut harus ditunda terlebih dahulu sebelum masalah atau kendalanya sudah selesai barulah isin moratorium atau penundaan ini akan di cabut. Kebijakan ini sudah berlaku pada tahun 1999 di era Reformasi yakni di tegaskan dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian kebijakan atau aturan ini telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU No 32 Tahun 2004, kemudian menjadi UU No 23 tahun 2014, dan terakhir UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai mahal bagi pemerintah pusat, yaitu terkait DAU dan DAK. Namun demikian, kebijakan ini dipandang berlawanan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengizinkan adanya pemekaran daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik-LIPI, penundaan pemekaran hanya bisa dilakukan dengan mencabut atau memperbaiki peraturan pemerintah terkait, karena moratorium tidak ada dalam perundangan. Pembuatan grand design pemekaran misalnya, dapat mencegah pemaksaan pemekaran melalui lobi, demonstrasi, dan makelar.

Penerapan kebijakan moratorium atau penundaan ini juga terjadi di wilayah luwu raya yang dimana wacana ini belum terlaksana dikarenakan pemerintah pusat belum mencabut izin moratorium ini sehingga pemekaran luwu raya ini tidak terlaksana hingga sekarang. Alasan pemerintah belum mencabut isin moratorium mengenai pemekaran wilayah luwu ray aini adalah dimana pemerintah mengatakan bahwa daerah luwu raya belum siap atau belum memenuhi kriteria wilayah yang mampu dijadikan sebagai wilayah provinsi. Alasan tersebut selalu dikatakan oleh pemerintah. Padahal realita yang dilihat wilayah luwu raya sudah memumpuni dari segi kriteria, seperti dari segi ekonomi atau potensi daerah yang dimiliki dimana luwu sudah maju dari segi ekonomi, kemudian sosial budaya dan juga kependudukan yang bisa dikatakan Makmur, kemudian luas daerah yang apabila diambil dari segi wilayah dimana luwu ini merupakan salah satu wilayah yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan yang dikatakan Makaganza (2008, h. 17) bahwa Istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupheisme) yang menyatakan proses “perpisahan” atau “pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Keluarnya Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah PP No 129 tahun 2000 tentang cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah menandai momentum bagi daerah untuk mengajukan usulan pemekaran daerah. Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 22/199 menggariskan soal pembentukan daerah. “Daerah dibentuk berdasarkan

pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Dengan begitu tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak mencabut izin moratorium atau penundaan tersebut (Sos, 2019)(Abd Rahman & Awaru, 2019).

Upaya yang pemerintah daerah dan juga hanya mampu mengupayakan menjalin komunikasi dengan baik kepada pemerintah pusat agar secepatnya mampu mencabut kebijakan izin moratorium ini. Sedangkan masyarakat hahnya mampu turun kejalan dengan melakukan suatu gerakan yakni gerakannya adalah Aliansi Wija To Luwu dengan begini diharapkan kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah daerah agar bersama-sama menyuarakan dan menyamapaikan aspirasinya agar mampu didengar oleh pemerintah pusat dengan demikian izin moratorium atau penundaan ini bisa dicabut secepatnya.

Terkait dengan penelitian ini yang dimana pada dasarnya Gerakan Sosial Aliansi Wija To Luwu yang bisa dikatakan hingga sekarang masih terbilang absoult atau ambigu, yang dimana gerakan ini belum semestinya berhasil dalam menyuarakan suatu gerakan maka dari itu ada beberapa keterkaitan gerakan yang dimana gerakan ini juga bisa dikatakan sebagai gerakan yang belum semestinya berhasil diantaranya yakni, Gerakan sosial demonstrasi buruh di Jawa Timur pada tahun 2013-2022 yang dimana dalam gerakan sosial ini para buruh dalam memperjuangkan hak kehidupan buruh yang tidak terakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Langkah yang dapat dilakukan yakni demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh di Jawa Timur di Gedung Negara Graha Surabaya dengan memanfaatkan kelompok-kelompok oerorganisasi buruh sehingga memberikan jumlah massa yang banyak agar aspirasi mereka dapat didengar oleh pemerintah. Tetapi, seperti biasa pemerintah hingga sekarang belum mendengarkan atau menepati janjinya sesuai dengan yang dikatakan seperti menaikkan upah atau gaji buru sebagaimana mestinya.

Kemudian gerakan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 2019 mengenai RUU KPK pada saat itu, yang dimana perkembangan dinamika gerakan mahasiswa di Tahun 2019 terkait revisi RUU KPK dimulai dari proses mobilisasi dan pembangunan narasi. Proses mobilisasi terjadi dari proses konsolidasi yang dipimpin kelompok BEM dengan narasi Reformasi Dikorupsi. Dalam proses mobilisasinya, terdapat berbagai hambatan yang terjadi dari aparaturnegara seperti pembatasan bus pemberangkatan, hack telepon seluler, dan provokasi-provokasi kelompok tak dikenal. Sekalipun begitu, proses mobilisasi banyak memanfaatkan media sosial dan pertemuan antar organisasi mahasiswa yang berhasil menghimpun kekuatan besar demonstrasi. Narasi reformasi dikorupsi berkaitan erat dengan KPK sebagai akar reformasi telah direformasi. Kombinasi hal-hal ini membuat gerakan sosial demonstrasi RUU KPK 2019 berjalan secara masif. Namun, gerakan ini dianggap tidak efektif dengan sahnya RUU KPK oleh DPRRI. Faktor utama ketidakberhasilan gerakan ini berasal dari kuatnya solidaritas elit, terlihat dari

dukungan fraksi di DPR RI. Dengan begitu, kesempatan politik untuk merubah kebijakan menjadi kecil. Akibatnya, aspirasi mahasiswa tidak didengarkan dan 52 kebijakan diambil secara sepihak oleh elit yang homogen dalam sikap RUU KPK Tahun 2019.

Berdasarkan dari beberapa gerakan sosial diatas yang dimana terbilang kurang berhasil dalam pelaksanaannya itu sudah cukup terbilang baik dan begitupun dengan keterkaitan antara penelitian ini dengan gerakan sosial diatas adalah masing-masing gerakan ini muncul karena kesadaran Masyarakat yang besar sehingga menopang untuk terbentuknya suatu gerakan walaupun disisi lain gerakan ini masih kurang berhasil tetapi sekalipun demikian, gerakan ini dapat menjadi bahan pendidikan politik masyarakat serta membuktikan bahwa gerakan sosial di Indonesia masih dapat bertumbuh dan berkembang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian wawancara dalam penelitian ini tentang “Gerakan Sosial Aliansi Wija To Luwu Terhadap Wacana Pembentukan Provinsi Luwu Raya” maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah 1). Tahapan gerakan sosial aliansi Wija To Luwu dalam upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya terdiri dari empat tahapan yaitu tahap kemunculan (emergence), tahap peleburan (cholescene), tahap birokratisasi (bureaucratization) dan tahap penurunan (decline). Kemudian yang ke 2) Faktor penghambat dalam upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya ada dua yaitu kurangnya political will dari pemerintah dan juga adanya moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, S. K., & Awaru, A. O. T. (2019). LABELLING (STUDI KOMPARATIF PADA SISWA JURUSAN IPA DAN IPS DI MAN BINAMU JENEPONTO). *JURNAL SOSIALISASI*, 13–18.
- Achmad, Z. A. (2020). Anatomi teori strukturasi dan ideologi jalan ketiga Anthony Giddens. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(2), 45–62.
- Haris, A., Rahman, A. B. A. B., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 15–24.
- Khobir, A., & Khasanah, N. (2020). *Potret Diskriminasi Pendidikan: Gerakan Sosial Baru dan Perlawanan Agama Lokal “Agama Djawa Soenda.”* Penerbit NEM.
- Miles, B. (1992). Matthew dan Huberman, A. Michael, “*Analisis Data Kualitatif Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*”, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Pababari, M. (2023). Gerakan Perlawanan Seniman (Studi Kasus Karya Seni UKM SB ESA Merespon Kebijakan Pemerintah. *Macora*, 2(2), 9–22.
- Putra, A. D., Nurdin, E. S., & Ruyadi, Y. (2022). Volunteer Values in the Implementation of Community Education (Study on the GADABAK! Community in South Solok Regency. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 10(1), 165–174.
- RAHMATULLOH, G. W. (2020). *GERAKAN SOSIAL AKSI KAMISAN DALAM MENYIKAPI KEKERASAN KEMANUSIAAN DI INDONESIA*. Universitas Siliwangi.
- Rasyid, I., Dalle, A., & Idawati, I. (n.d.). Konstruksi Morfologis Bahasa Tae’ di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. *Wahana Literasi*, 1(1), 554340.
- Rochadi, A. F. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. Rasibook.

- Smelser, N. J. (2019). Sociology: Retrospect and prospect. In *Perspectives On Behavioral Science* (hal. 115–130). Routledge.
- Sos, G. Y. S. (2019). *Analisis Peran Walhi Dalam Advokasi Pencegahan Eksploitasi Kawasan Karst Oleh Industri Semen Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Syamsu, S., Burhan, R., & Haliq, A. I. S. (2020). Pemekaran Daerah Luwu Raya Sebagai Isu Kampanye Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 267–280.
- TRİYONO, R. N. U. R. A. (2020). *GERAKAN LINGKUNGAN STUDI KASUS GERAKAN KOMUNITAS TAMPOMAS BICARA DALAM MELESTARIKAN HUTAN DI DESA CIBEUREUM WETAN KABUPATEN SUMEDANG*. Universitas Siliwangi.
- Yani, J. A. (n.d.). Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research & Treatment*. New York: Plenum Press. Yudistira P, Chandra. Diktat Ku.